



RENJA TAHUN 2022

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JALAN UDAYANA NO. 11 MATARAM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya penyusunan Rancangan awal **Rencana Kerja (RENJA)** Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai gambaran dari serangkaian rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan selama tahun 2022, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah baik indikator RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 maupun Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

Semoga rancangan awal RENJA Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan media koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kerja di masa yang akan datang.

Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak – pihak yang sudah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022.

Mataram, 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

MAHDI, SH, MH

NIP. 19650423 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2020	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB....	49
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Table 1.	Realisasi Anggaran Progam/Kegiatan tahun 2020	8
Table 2.	Target Capaian Progam/Kegiatan tahun 2020.....	11
Table 3.	Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020	14
Table 4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	21
Table 5.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi NTB	25
Table 6.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Tahun 2021.....	38
Table 7.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan melalui pembiayaan APBD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju 2022	39
Table 8.	Program/Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Tahun 2021.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra-OPD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Sebagai penjabaran dari Renstra OPD, maka OPD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Ranwal Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun 2022 merupakan rencana tahunan yang menjadi landasan/pedoman/ acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB . Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB dilakukan

dengan menghimpun masukan-masukan dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi NTB yaitu bagian Persidangan dan Perundang-undangan, bagian Umum dan Hubungan Masyarakat serta bagian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat DPRD mempunyai tugas yaitu 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta 2) Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan d) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk itu RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NTB Tahun 2022 disusun sebagai dokumen teknis operasional pelaksanaan kegiatan selama satu tahun agar lebih terarah sesuai dengan Visi-Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perrwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 40 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Povinsi Nusa Tenggara Barat.

21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENJA Sekretariat DPRD Provinsi NTB ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*. Disamping itu RENJA ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategik SKPD melalui pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang pertanggungjawabannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Tujuan penyusunan RENJA ini antara lain :

1. Tersusunnya instrumen RENJA yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB;
2. Tersusunnya program/kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi NTB;
3. Tersusunnya pendanaan indikatif program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka RENJA ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan awal RENJA Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan RENJA yang memuat gambaran umum tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RENJA

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau Tahun 2021, mengacu pada APBD Tahun 2021, dikaitkan dengan capaian target Renstra mengacu pada laporan kinerja dan/atau realisasi APBD Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Analisa Kinerja, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

Mengemukakan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

Menggambarkan kebutuhan anggaran serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2020

Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap target yang telah dibuat dalam pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui kegiatan-kegiatan yang tercapai dan belum tercapai baik secara makro maupun lingkup instansi. Pelaksanaan evaluasi Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2020 secara makro bercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, pada RENJA Tahun 2020 dituangkan dalam 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2020 sebesar 93,13%, dan realisasi fisik rata-rata 100%. Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2020 mengelola anggaran sebesar Rp.122.633.449.112,70,-, yang merupakan gabungan antara Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD, sampai dengan Bulan Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 114.207.281.115,- (93,13%), dengan rincian sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp.53.669.113.000,-, terealisasi Rp.49.349.065.410,- (91,95%).
- **Belanja Langsung** sebesar Rp.68.964.336.112,70,-, terealisasi sebesar Rp. 64.858.215.705,- (94,05%).

Kurangnya realisasi Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 93,63% diakibatkan masa transisi anggota DPRD terpilih dimana ada beberapa tunjangan yang sudah dianggarkan tidak bisa diserap dikarenakan belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD.

Sementara untuk realisasi Belanja Langsung mencapai 94,05%, ini diakibatkan oleh Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat memenuhi target. Dari enam program yang dilaksanakan, terdapat empat program yang realisasi anggarannya dibawah 90%, dikarenakan penatausahaan keuangan yaitu penyediaan dana yang ada di BPKAD atau surat persediaan dana (SPD) yang tidak keluar :

Adapaun Capaian masing-masing Program dan Kegiatan Tahun 2020 adalah:

Table 1. Realisasi Anggaran Progrom/Kegiatan tahun 2020

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d DESEMBER 2020			SISA ANGGARAN (Rp.)
		KEUANGAN		FISIK	
		(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
DPRD dan SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB	122,633,449,112.70	114,207,281,115	93.13	100	8,426,167,998
BELANJA TIDAK LANGSUNG	53,669,113,000.00	49,349,065,410	91.95	100	4,320,047,590
BELANJA LANGSUNG	68,964,336,112.70	64,858,215,705	94.05	100	4,106,120,408
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Prov. NTB	41,888,510,000.00	38,235,414,930	91.28	100	3,653,095,070
BELANJA TIDAK LANGSUNG	41,888,510,000.00	38,235,414,930	91.28	100	3,653,095,070
SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB	80,744,939,112.70	75,971,866,185	94.09	100	4,773,072,928
BELANJA TIDAK LANGSUNG : SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB	11,780,603,000.00	11,113,650,480	94.34	100	666,952,520
BELANJA LANGSUNG : SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB	68,964,336,112.70	64,858,215,705	94.05	100	4,106,120,408
Program Pelayanan Adm. Perkantoran	6,964,712,720.00	5,949,313,541	85.42	100	1,015,399,179
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,114,804.00	2,040,000	28.67	100	5,074,804
Penyediaan Jasa komunikasi SDA dan listrik	1,281,340,229.00	737,846,252	57.58	100	543,493,977
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	133,200,000.00	133,200,000	100.00	100	-
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	1,180,694,350.00	1,165,667,581	98.73	100	15,026,769
Penyediaan Alat Tulis Kantor	477,013,100.00	412,866,800	86.55	100	64,146,300
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	510,475,000.00	326,573,250	63.97	100	183,901,750
Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78,900,000.00	76,905,700	97.47	100	1,994,300
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	337,000,000.00	325,165,000	96.49	100	11,835,000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d DESEMBER 2020			SISA ANGGARAN (Rp.)
		KEUANGAN		FISIK	
		(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	315,036,383.00	260,155,060	82.58	100	54,881,323
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	180,156,654.00	170,230,400	94.49	100	9,926,254
Penyediaan Makanan dan Minuman	1,226,215,500.00	1,183,776,576	96.54	100	42,438,924
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	82,481,700.00	82,481,700	100.00	100	-
Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran	137,265,000.00	124,600,000	90.77	100	12,665,000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1,017,820,000.00	947,805,222	93.12	100	70,014,778
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,645,111,162.30	2,955,700,984	81.09	100	689,410,178
Pengadaan mobil jabatan	651,350,000.00	650,080,000	99.81	75	1,270,000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	225,810,000.00	213,210,000	94.42	100	12,600,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	328,000,895.00	300,586,529	91.64	100	27,414,366
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	347,400,000.00	344,234,563	99.09	100	3,165,437
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	299,999,999.60	191,464,832	63.82	100	108,535,168
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional	1,098,910,369.00	787,876,560	71.70	88	311,033,809
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	618,639,898.70	393,976,500	63.68	100	224,663,399
Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan	-	-	-	100	-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	75,000,000.00	74,272,000	99.03	100	728,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	108,749,100.00	77,673,000.00	71.42	100	31,076,100
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	108,749,100.00	77,673,000	71.42	100	31,076,100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu	287,647,165.00	250,781,000.00	87.18	100	36,866,165
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43,899,000.00	41,376,000	94.25	100	2,523,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	77,338,165.00	69,594,000	89.99	100	7,744,165
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	166,410,000.00	139,811,000	84.02	100	26,599,000
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	25,500,000.00	25,500,000	100.00	100	-
Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	25,500,000.00	25,500,000	100.00	100	-

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d DESEMBER 2020			SISA ANGGARAN (Rp.)
		KEUANGAN		FISIK	
		(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	57,932,615,965.40	55,599,247,180	95.97	100	2,333,368,785
Peningkatan Kualitas Rancangan Peraturan Daerah	3,391,700,000.00	2,787,493,752	82.19	100	604,206,248
Hearing/Dialog dan Koordinasi dgn Pejabat Pemda dan tokoh masyarakat/Tokoh Agama	52,721,803.00	48,802,500	92.57	100	3,919,303
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	3,176,451,291.00	2,811,252,360	88.50	100	365,198,931
Rapat-rapat Paripurna	869,800,000.00	508,246,225	58.43	100	361,553,775
Kegiatan Reses	15,891,259,396.00	15,830,641,812	99.62	100	60,617,584
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	30,942,180,581.40	30,327,144,845	98.01	100	615,035,736
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1,914,606,286.00	1,879,056,286	98.14	100	35,550,000
Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1,693,896,608.00	1,406,609,400	83.04	100	287,287,208

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2,tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1, tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2020. Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan anggaran keuangan dan fisik terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Evaluasi Renja dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan Renja yang direncanakan. Evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, dititikberatkan pada pencapaian realisasi penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Table 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2020

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT DPRD	KET
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				
1		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD	100%	80%	Refokusing Anggaran untuk covid-19 yang mengakibatkan beberapa target tidak tercapai	Penyesuaian Target		
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang Ditindaklanjuti	100%	70%				
		Penyusunan Peraturan Daerah	jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disusun	16 Perda	11 Perda				
		Hearing/dialog dengan pejabat/pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	120 orang	60 orang				
		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	480 orang	540 orang				
		Rapat-rapat paripurna	jumlah rapat paripurna	252 kali	268 kali				
		Kegiatan reses	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 kali	3 kali				
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	2860 SPPD	2898 SPPD				
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/ pelatihan lainnya	65 orang	65 orang				
		Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	32 kali	53 kali				

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

Pada tahun 2020, sebagai bagian dari pencapaian Sekretariat DPRD Provinsi NTB, dari target 16 perda, berdasarkan hasil pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif, ditetapkan 11 Rancangan perda telah disahkan menjadi Perda, 4 Perda merupakan usul

prakarsa DPRD dan 7 Perda usul prakarsa Gubernur. 11 Perda yang telah ditetapkan tahun 2020, yaitu:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB.
2. Pembubaran Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing.
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Tata Niaga Ternak
5. Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
7. Penanggulangan Penyakit Menular
8. Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan.
9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 3. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2023	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.01	Program pelayanan administrasi perkantoran.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100							
04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	surat	7,540	13261	5000	1508	30.16	5000	19769	262.19
04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening	jenis	5	3	1	5	500.00	1	9	180.00
04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	orang	50	3	1	10	1000.00	1	14	28.00
04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang tenaga kebersihan kantor	orang	190	3	1	38	3800.00	1	42	22.11
04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	jenis	4	3	1	4	400.00	1	8	200.00
04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	jenis	3	3	1	3	300.00	1	7	233.33
04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis	6	3	1	6	600.00	1	10	166.67
04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	7	3	1	7	700.00	1	11	157.14
04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis	3	3	1	3	300.00	1	7	233.33
04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah bahan bacaan	jenis	3	3	8	8	100.00	1	12	-
04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang tenaga pramusaji	orang	125	3	1	1	100.00	1	5	-

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2023	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	SPPD	200	3	1	40	4000.00	1	44	22.00
04.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	orang	15	3	1	3	300.00	1	7	46.67
04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	orang	175	0	18	18	100.00	25	43	-
04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100							
04.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan	unit	4	3	1	3	300.00	0	6	150.00
04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	10	4	2	1	50.00	2	7	70.00
04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	unit	1	12	0	0	0.00	0	12	1200.00
04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	2	3	1	2	200.00	1	6	300.00
04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	unit	4	3	1	4	400.00	1	8	200.00
04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	61	3	1	61	6100.00	1	65	106.56
04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	jenis	7	3	1	7	700.00	1	11	157.14
04.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yang direhab	unit	1	3	1	2	200.00	1	6	600.00

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2023	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhab	unit	2	0	0	0	#DIV/0!	1	1	50.00
04.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%								
04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah orang yang disediakan pakaian dinas dan perlengkapannya	orang	3	0	1	0	0.00	1	1	33.33
04.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah orang yang disediakan pakaian khusus hari-hari tertentu	orang	6	0	2	0	0.00	2	2	33.33
04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100							
04.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	orang	130	3	1	130	13000.00	1	134	103.08
04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%	100							
04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	dokumen	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun	dokumen	16							

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2023	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100							
04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan asset	dokumen	10	3	1	2	200.00	1	6	60.00
04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD	%	41.09							
		Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti	%	88.00							
04.15.01	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disusun	raperda	43	34	12	13	108.33	12	59	137.21
04.15.02	Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	orang	2,400	78	48	15	31.25	48	141	5.88
04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	kali	1,260	1928	800	234	29.25	800	2962	235.08
04.15.04	Rapat-rapat paripurna	jumlah rapat paripurna	kali	240	96	29	35	120.69	29	160	66.67
04.15.05	Kegiatan reses	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	kali	14	9	3	3	100.00	3	15	107.14
04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	SPPD	14,300	109	55	31	56.36	55	195	1.36

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2023	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/pelatihan lainnya	orang	65	9	3	65	2166.67	3	77	118.46
04 . 15 . 08	Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	kali	160	242	27	46	170.37	27	315	196.88

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada Ranwal RENJA Tahun 2022, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dijabarkan melalui indikator kinerja Program yaitu :

1. Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terealisasi 100%.
 - Menunjukkan bahwa kebutuhan dan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD berupa administrasi surat menyurat, seluruh kegiatan rutin perkantoran seperti pembayaran rekening listrik, telepon dan air terselesaikan, jasa tenaga pengelola keuangan, jasa petugas kebersihan dan petugas keamanan bisa terbayarkan.
2. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terealisasi 100%.
 - Menunjukkan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana berupa pembangunan/rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, pengadaan mobil jabatan, pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, gedung kantor dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor bisa dilaksanakan seluruhnya.
3. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur terealisasi 100%.
 - Menunjukkan seluruh ASN Sekretariat DPRD ditingkatkan kapasitas mental dan fisiknya melalui kegiatan Peningkatan Iman dan Taqwa
4. Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan terealisasi 5 dokumen atau 100%.
 - Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun adalah ;
 - a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1 (satu) dokumen
 - b. Laporan Keuangan SKPD 1 (satu) dokumen.
 - c. Rencana Kerja Tahun 2021 1 (satu) dokumen.
 - d. RKA Perubahan Tahun 2020 1 (satu) dokumen.
 - e. RKA Tahun 2021 1 (satu) dokumen.
5. Jumlah laporan asset yang dikelola terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
6. Prosentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat terealisasi 100%.
 - Menunjukkan seluruh kegiatan DPRD terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Tahun 2020 telah dilaksanakan pembahasan 6 (enam) buah Rancangan Perda Inisiatif DPRD, terlaksananya 21 kali hearing/dengar pendapat dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Mahasiswa, terlaksananya 210 kali Rapat-Rapat Alat Kelengkapan

Dewan, terlaksananya 48 kali rapat paripurna, terlaksananya 3 kali reses, terlaksananya 42 kali kunjungan kerja ke Dalam dan Luar Daerah, terlaksananya 3 kali Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan terlaksananya 45 kali publikasi kegiatan DPRD.

Melihat capaian kinerja masing-masing indikator, dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2020.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara barat adalah :

1. Sarana dan prasarana yang memadai, dimana kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan memenuhi syarat standar minimal yang memungkinkan upaya operasional pelayanan terhadap DPRD dapat efektif dan efisien;
2. Kuantitas personil yang memadai dalam memberikan pelayanan. Jumlah pegawai yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat DPRD. Namun untuk lebih berguna dan berdaya guna perlu dilakukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai substansi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Tersedianya anggaran yang cukup bagi pembiayaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lebih khusus lagi dalam DPA Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, khususnya pada indikator prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yang hanya tercapai 54,06% dari target 100% adalah adanya kekurangcermatan dalam penetapan target kinerja yang dilakukan pada penyusunan perencanaan dokumen strategis jangka menengah SKPD, dimana target kinerja yang ditetapkan ternyata tidak realistis tidak mengikuti trend realisasi per kegiatan, sehingga target yang ditetapkan jauh dari kemampuan pencapaian. Sehingga pada perencanaan tahun-tahun berikutnya penting untuk dilakukan pengkajian ulang target pada beberapa

indikator kinerja agar dapat lebih memenuhi kriteria indikator kinerja yang lebih SMART (*smart, measurable, achievable, relevant, time bound*).

Table 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Target IKK	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Rancangan peraturan daerah yang dibahas dan disetujui	Perda	12	16	16	16	16	14	16	12	
2		Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Kali	48	480	48	48	21	540	48	48	
3		Rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	Kali	800	252	480	480	210	268	480	480	
4		Rapat paripurna yang difasilitasi	Kali	29	48	48	48	48	46	48	48	
5		laporan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Kali	3	3	3	3	3	2	3	3	
6		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Kali	56	28	28	28	42	28	28	28	
7		laporan kegiatan peningkatan kapasitas (bintek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	Kali	3	3	3	3	3	3	3	3	
8		Publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Kali	12	32	32	32	45	39	32	32	
9		Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep diperkenalkan yaitu konsep (Good Governance) tata pemerintahan yang baik. Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-

politik dan kinerja dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi NTB, pada tahun 2022 mendatang merupakan tahun keempat masa jabatan keanggotaan periode 2019-2023 dan merupakan tahun keempat periode jabatan Gubernur, sehingga Sekretariat DPRD harus dapat menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan visi dan misi Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat DPRD mempunyai tugas 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta 2) Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan d) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah utamanya bagi Institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.

Untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan seperti telah disebutkan diatas, maka permasalahan utama yang menghambat dalam upaya pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB terhadap

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain adalah :

- 1) Masih terdapat uraian tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan subbagiannya dalam Peraturan Gubernur tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Belum tersusunnya Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi NTB sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD selama Tahun 2020.
- 3) Masih rendahnya kualitas perencanaan khususnya penyusunan target kinerja dan penilaian kinerja.
- 4) Masih rendahnya profesionalitas dan kompetensi aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dalam kaitannya dengan semakin tingginya standar pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD.
- 5) Lingkungan kantor dan ruangan belum tertata secara maksimal untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kemudahan kerja.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut maka dirumuskan Isu Strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD yaitu: “Belum optimalnya pelayanan fasilitasi koordinasi antara pihak legislatif dengan eksekutif”.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dan mengantisipasi segala dinamika politik di Tahun 2020, dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah mengusulkan Program dan Kegiatan dengan besaran anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Untuk meninjau kembali perencanaan awal sehingga dapat diketahui kesalahan atau bahkan kelebihan dari hal-hal yang telah tertuang dalam Rancangan Awal, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan Review Rancangan Awal RKPD.

Review dilakukan dengan membandingkan Usulan Program dan Kegiatan yang telah dimasukkan dalam Rancangan Awal RKPD dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan

dalam satu tahun. Besarnya kebutuhan anggaran dihitung berdasarkan trend realisasi Tahun sebelumnya dan memperhatikan RKBMD.

Berdasarkan analisis kebutuhan anggaran Sekretariat DPRD lebih besar daripada yang telah diusulkan dalam Rancangan Awal RKPD, terdapat beberapa kebutuhan DPRD yang belum terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD yaitu :

- a. Terdapat perbedaan cukup signifikan pada kebutuhan anggaran pembayaran jasa tenaga-tenaga kontrak seperti petugas kebersihan, tenaga pramusaji dan petugas keamanan yang disesuaikan dengan peningkatan nilai upah minimum provinsi. Dimana anggaran yang dibutuhkan lebih besar daripada yang telah diusulkan.
- b. Anggaran belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan juga lebih besar dari yang telah diusulkan pada Rancangan Awal RKPD karena masih terdapat beberapa kebutuhan khususnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan ruang kerja Pimpinan DPRD, yang sudah dimasukkan dalam RKBMD belum mendapat alokasi anggaran.
- c. Dalam kebutuhan juga telah dimasukkan beberapa kegiatan yang terkait dengan pergantian Pimpinan DPRD, yaitu pengadaan mobil jabatan, rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Pimpinan DPRD, serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang mencakup rehab ruang kerja Pimpinan DPRD.

Table 5.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi NTB

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD		BB	85,630,093,362	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD		BB	90,023,313,367
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kota Mataram	22 Dok	317,295,100	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kota Mataram	22 Dok	317,295,100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Mataram	1 dok	27,187,700		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Mataram	2 dok	27,187,700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	88,644,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	88,644,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	88,644,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	88,644,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	35,000,000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	35,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	35,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	Kota Mataram	1 dok	35,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP	Kota Mataram	1 dok	29,208,400		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP	Kota Mataram	1 dok	29,208,400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD	Kota Mataram	16 dok	13,611,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD	Kota Mataram	16 dok	13,611,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Kota Mataram	5 jenis	15,390,960,773	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Kota Mataram	5 Jenis	15,390,960,773

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	Kota Mataram	130 org	14,730,483,373		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	Kota Mataram	130 org	14,730,483,373
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa	Kota Mataram	4 org	431,005,100		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PTT	Kota Mataram	4 org	431,005,100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	Kota Mataram	7500 org	157,151,000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Kota Mataram	60 org	157,151,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Kota Mataram	1 dok	50,974,800		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Kota Mataram	1 dok	50,974,800
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Kota Mataram	3 dok	21,346,500		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Kota Mataram	3 dok	21,346,500
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD		7 dok	26,200,000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD		7 dok	26,200,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	Kota Mataram	5 dok	5,000,000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	Kota Mataram	5 dok	5,000,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis DMD yang diamankan	Kota Mataram	0 jenis	-		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis DMD yang diamankan	Kota Mataram	0 jenis	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	Kota Mataram	2 dok	9,125,000		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	Kota Mataram	2 dok	9,125,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis bahan penatausahaan BMD	Kota Mataram	2 jenis	12,075,000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis bahan penatausahaan BMD	Kota Mataram	2 jenis	12,075,000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah jenis barang	Kota Mataram	0 jenis	-		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah jenis barang	Kota Mataram	0 jenis	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah jenis layanan	Kota Mataram	4 jenis	634,093,200	4	Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis layanan kepegawaian	Kota Mataram	4 jenis	2,128,698,600

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Daerah	kepegawaian					Perangkat Daerah				
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	Kota Mataram	129 org	154,605,400		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	Kota Mataram	129 org	554,605,400
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang diberikan pakain dinas	Kota Mataram	0 org	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang diberikan pakain dinas	Kota Mataram	0 org	754,605,400
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	Kota Mataram	129 org	29,486,800		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	Kota Mataram	129 org	109,486,800
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Kota Mataram	0 org	-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Kota Mataram	0 org	260,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	100 org	35,001,000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	100 org	35,001,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Kota Mataram	20 org	415,000,000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Kota Mataram	20 org	415,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD		9 jenis	1,261,439,600	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD		9 jenis	4,297,577,900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Kota Mataram	4 jenis	93,390,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Kota Mataram	6 jenis	70,967,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kota Mataram	0 jenis	-		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kota Mataram	5 jenis	518,716,100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan Rumah tangga yang	Kota Mataram	1 jenis	33,592,000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kota Mataram	3 jenis	63,360,000

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		disediakan									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Kota Mataram	22 jenis	302,690,700		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Kota Mataram	50 jenis	529,979,400
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	7 jenis	161,650,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 jenis	496,154,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	3 jenis	206,480,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	3 jenis	172,800,000
	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan/material	Kota Mataram	0 jenis	-		Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan/material	Kota Mataram	0 jenis	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kota Mataram	2200 org	185,976,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Provinsi NTB	1890 org	1,460,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Mataram	36 kali	70,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Provinsi NTB	40 kali	577,940,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis bahan arsip	Kota Mataram	3 jenis	133,260,900		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis bahan arsip	Kota Mataram	3 jenis	133,260,900
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Mataram	16 org	74,400,000		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Mataram	14 org	274,400,000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah		2 jenis	5,348,560,600	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah		2 Jenis	5,182,361,600
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan jabatan	Kota Mataram	3 unit	2,100,000,000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan jabatan	Kota Mataram	3 unit	1,405,940,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kota Mataram	1 unit	400,000,000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kota Mataram	0 unit	400,000,000

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Kota Mataram	0 unit	-		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Kota Mataram	0 unit	-
	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel yang diadakan	Kota Mataram	3 jenis	914,652,000		Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel yang diadakan	Kota Mataram	5 jenis	1,342,513,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	Kota Mataram	9 jenis	1,863,998,600		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	Kota Mataram	9 jenis	1,863,998,600
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	Kota Mataram	2 jenis	69,910,000		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	Kota Mataram	2 jenis	169,910,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Mataram	0 unit	-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Mataram	unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kota Mataram	unit	-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kota Mataram	unit	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jenis	4,793,218,194	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jenis	4,893,218,194
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	Prov. NTB	1000 surat	15,700,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	Provinsi NTB	1500 surat	115,700,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. NTB	4 jenis	1,113,301,500		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi NTB	5 jenis	1,113,301,500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga non ASN	Prov. NTB	116 org	3,664,216,694		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum	Provinsi NTB	73 org	3,664,216,694
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah		6 jenis	12,147,107,000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah		6 Jenis	12,500,107,000

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	Prov. NTB	4 unit	167,600,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	Prov. NTB	4 unit	567,600,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	Prov. NTB	66 unit	1,198,060,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	Provinsi NTB	70 unit	1,198,060,000
	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mebel	Prov. NTB	6 jenis	47,000,000		Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mebel	Prov. NTB	6 jenis	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin	Prov. NTB	10 jenis	572,600,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin	Prov. NTB	5 jenis	572,600,000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain	Prov. NTB	1 jenis	15,000,000		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain	Prov. NTB	1 jenis	15,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	Provinsi NTB	3 unit	7,201,847,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	Prov. NTB	2 unit	7,201,847,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Provinsi NTB	3 unit	2,945,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Provinsi NTB	3 Unit	2,945,000,000
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD		3 jenis	44,814,685,395	9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD		3 Jenis	42,390,360,700
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	Prov. NTB	65 org	43,192,800,895		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	Prov. NTB	65 org	41,888,510,000

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah jenis pakaian dprd	Prov. NTB	3 jenis	971,884,500		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah jenis pakaian dprd	Prov. NTB	325 steel	501,850,700
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD	Prov. NTB	65 org	650,000,000		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD	Prov. NTB	0 org	-
10	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD		3 jenis	896,533,500	10	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD		3 jenis	2,896,533,500
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	Prov. NTB	0 org	-		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	Prov. NTB	0 Org	-
	Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah fasilitasi fraksi DPRD	Prov. NTB	180 kali	200,134,000		Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah fasilitasi fraksi DPRD	Prov. NTB	108 kali	800,134,000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Prov. NTB	46 kali	596,000,000		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Prov. NTB	122 kali	1,596,000,000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD	Prov. NTB	3 jenis	100,399,500		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD	Prov. NTB	6 jenis	500,399,500
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100 %	33,381,967,362	II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100 %	44,278,929,762
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi		9 dok	2,107,474,000	1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi		9 dok	2,107,474,000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	Prov. NTB	6 raperda	344,610,000		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	Prov. NTB	6 raperda	344,610,000
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	Prov. NTB	12 raperda	354,746,000		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	Prov. NTB	12 raperda	354,746,000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perda	Prov. NTB	1 kali	1,110,968,000		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi perda	Prov. NTB	1 kali	1,110,968,000

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	Prov. NTB	6 naskah	276,000,000		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	Prov. NTB	6 naskah	276,000,000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib	Prov. NTB	1 dok	21,150,000		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib	Prov. NTB	1 dok	21,150,000
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran		4 dok	310,000,000	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran		4 dok	835,000,000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	Prov. NTB	14 kali	70,000,000		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	Prov. NTB	14 kali	170,000,000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prov. NTB	15 kali	70,000,000		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prov. NTB	10 kali	170,000,000
	Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	Prov. NTB	14 kali	70,000,000		Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	Prov. NTB	3 kali	170,000,000
	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	Prov. NTB	10 kali	70,000,000		Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	Prov. NTB	3 kali	170,000,000
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat Pembahasan Laporan Semester	Prov. NTB	0 kali	-		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat Pembahasan Laporan Semester	Prov. NTB	5 kali	70,000,000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prov. NTB	10 kali	30,000,000		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prov. NTB	17 rapat	85,000,000
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		5 dok	220,000,000	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		5 dok	900,000,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prov. NTB	36 kali	40,000,000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prov. NTB	48 kali	140,000,000

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
							Hukum				
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prov. NTB	36 kali	40,000,000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prov. NTB	48 kali	140,000,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prov. NTB	36 kali	40,000,000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prov. NTB	48 kali	140,000,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prov. NTB	36 kali	40,000,000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prov. NTB	48 kali	140,000,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Prov. NTB	36 kali	40,000,000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Prov. NTB	48 kali	140,000,000
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prov. NTB	1 dok	20,000,000		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prov. NTB	2 kali	120,000,000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah rapat Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prov. NTB	0 kali	-		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah rapat Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prov. NTB	3 kali	40,000,000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Prov. NTB	0 dok	-		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Prov. NTB	dok	40,000,000

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		65 orang	3,498,687,862	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		65 Org	4,839,509,862
	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Orientasi		0 org	-		Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Orientasi		0 org	-
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	Prov. NTB	65 org	2,000,977,700		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	Prov. NTB	65 org	2,000,977,700
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi	Prov. NTB	36 kali	800,000,000		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi	Prov. NTB	36 kali	1,688,072,000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	Prov. NTB	200 org	325,250,000		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	Prov. NTB	200 org	378,000,000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Prov. NTB	9 org	300,000,000		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Prov. NTB	9 org	300,000,000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi	Prov. NTB	480 org	40,000,000		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi	Prov. NTB	480 org	240,000,000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	Prov. NTB	1 dok	32,460,162		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	Prov. NTB	1 dok	232,460,162
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		5 dok	18,035,000,000	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		5 dok	25,706,750,000
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD	Prov. NTB	975 SPPD	5,500,000,000		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD	Prov. NTB	1275 SPPD	8,832,600,000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prov. NTB	2 dok	100,000,000		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prov. NTB	2 dok	100,000,000
	Pelaksanaan Reses	Jumlah reses	Prov. NTB	3 kali	12,435,000,000		Pelaksanaan Reses	Jumlah reses	Prov. NTB	3 kali	16,774,150,000
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		2 dok	33,000,000	6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		2 dok	712,390,400

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	Prov. NTB	1 dok	15,000,000		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	Prov. NTB	100 buku	396,095,400
	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	Prov. NTB	12 kali	18,000,000		Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	Prov. NTB	12 kali	316,295,000
7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD		4 jenis	9,177,805,500	7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD		4 Jenis	9,177,805,500
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah SPPD	Prov. NTB	975 SPPD	8,500,000,000		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah SPPD	Prov. NTB	975 SPPD	8,500,000,000
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD	Prov. NTB	1 dok	11,005,500		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD	Prov. NTB	1 dok	11,005,500
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	Prov. NTB	12 dok	100,000,000		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	Prov. NTB	12 dok	100,000,000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	Prov. NTB	4 org	566,800,000		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	Prov. NTB	4 org	566,800,000
	TOTAL USULAN ANGGARAN				119,012,060,724		TOTAL USULAN ANGGARAN				134,302,243,129

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Presiden RI yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan tahun ke dua RPJMN tahun 2020-2024 yang akan focus pada aspek ekonomi dan reformasi social pasca pandemic virus corona (covid-19). RKP 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024, untuk itu tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan Provinsi NTB selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 dimana Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB adalah **“MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG”**, yang akan diwujudkan melalui 6 (enam) Misi pembangunan, yaitu:

1. **NTB TANGGUH DAN MANTAP** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.

2. **NTB BERSIH DAN MELAYANI** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. **NTB SEHAT DAN CERDAS** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. **NTB ASRI DAN LESTARI** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. **NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI** melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. **NTB AMAN DAN BERKAH** melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 mengambil tema **“Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”**.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu :

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah.
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek dan memberi arah serta dasar yang jelas bagi organisasi. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya

sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran harus menyatakan persis apa yang ingin dicapai suatu organisasi atau tingkat-tingkat untuk mencapai tujuan. Sasaran bersifat operasional dengan periode waktu dan target yang lebih spesifik.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu mendukung misi ke 2 “**NTB Bersih dan Melayani**”, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB selaku Organisasi Perangkat Daerah Pendukung, menetapkan **Tujuan** untuk Tahun 2019-2023 yaitu:

Table 6. Tujuan dan Sasaran Perangkat Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan operasional dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran OPD dirumuskan dalam program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2021 dijabarkan pada tabel 7.

Table 7. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan melalui pembiayaan APBD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	Prov NTB	BB	63.521.437.877,00	APBD		BB	70.036.047.295,00
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Prov NTB	22 Dok	328,346,681.21	APBD		22 Dok	358,488,326.46
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Renja	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Prov NTB	1 Dok	30,810,233.91	APBD		1 Dok	33,676,092.74
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Menyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Prov NTB	1 Dok	91,298,706.65	APBD		1 Dok	99,790,988.96
4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Prov NTB	1 Dok	85,320,403.67	APBD		1 Dok	93,156,605.41
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	Prov NTB	1 Dok	34,044,845.54	APBD		1 Dok	37,211,576.48
4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	Prov NTB	1 Dok	30,732,380.21	APBD		1 Dok	33,590,997.36
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan LKJIP, LKPJ-LPPD dan RKPD	Jumlah dokumen LKJIP	Prov NTB	1 Dok	25,484,791.44	APBD		1 Dok	27,555,296.47
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan Evaluasi Program dan Kegiatan bulanan	Jumlah dokumen evaluasi PD	Prov NTB	16 Dok	30,655,319.78	APBD		16 Dok	33,506,769.04
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Prov NTB	5 Jenis	12.166.160.626,67	APBD		5 Jenis	15,306,870,980.49
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	Prov NTB	129 Org	11.725.605.328,70	APBD		129 Org	14,803,476,460.03

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Membuat SPT/ SPPD serta SPJ bagi ASN yang melaksanakan tugas	Jumlah orang pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa	Prov NTB	3 Org	241,053,417.16	APBD		3 Org	263,475,352.18
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melakukan Verifikasi dokumen SPJ Belanja pada SKPD	Jumlah dokumen yang di verifikasi	Prov NTB	7500 Dok	171,939,970.76	APBD		7500 Dok	209,793,546.97
4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Prov NTB	1 Dok	3,371,167.25	APBD		1 Dok	3,684,741.29
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan Bahan Pemeriksaan yang dilakukan BPK dan Inspektorat	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Prov NTB	3 Dok	24,190,742.81	APBD		3 Dok	26,440,880.02
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi BMD	Prov NTB	7 Dok	22,466,515.64	APBD		7 Dok	24,556,271.35
4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	Prov NTB	5 Dok	1,841,517.68	APBD		5 Dok	2,012,809.13
4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	Prov NTB	2 Dok	6,941,105.08	APBD		2 Dok	7,586,742.09
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melakukan Penatausahaan BMD	Jumlah jenis bahan penatausahaan BMD	Prov NTB	2 Jenis	13,683,892.88	APBD		2 Jenis	14,956,720.13
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan kepegawaian	Prov NTB	4 jenis	328,903,320.39	APBD		4 jenis	363,180,544.75
4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Menyiapkan Daftar Hadir dan Absensi Elektronik	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	Prov NTB	129 Org	68,170,604.54	APBD		129 Org	74,511,592.71
5 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menyiapkan Atribut Pakaian Dinas seperti Papan Nama, Lencana Korpi serta Tanda Pengenal Kantor	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	Prov NTB	129 Item	6,000,000.00	APBD		129 Item	8,400,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Membuat Buku Penjagaan Terkait dengan SKP, Model DK, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawannya	Prov NTB	129 Org	33,415,669.78	APBD		129 Org	36,523,877.02
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Prov NTB	3 Org	6,000,000.00	APBD		3 Org	8,400,000.00
4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prov NTB	100 Org	28,332,174.40	APBD		100 Org	30,967,532.91
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Bimbingan Teknis dlaam rangka implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Prov NTB	20 Org	186,984,871.66	APBD		20 Org	204,377,542.11
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD	Prov NTB	9 Jenis	986.080.909,24	APBD		9 Jenis	1,125,180,120.32
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Prov NTB	4 Jenis	105,833,437.36	APBD		4 Jenis	115,677,688.83
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga Ketua DPRD	jumlah jenis peralatan Rumah tangga yang disediakan	Prov NTB	1 Jenis	95,154,901.33	APBD		1 Jenis	104,005,873.20
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meyediakan ATK, Makan Minum Rapat dan Bahan cetak Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Prov NTB	22 Jenis	159,987,040.24	APBD		22 Jenis	185,798,632.61
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Prov NTB	7 Jenis	73,665,693.28	APBD		7 Jenis	80,517,815.14
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan seperti koran, peraturan undang-undang dan buletin	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prov NTB	3 Jenis	213,991,735.16	APBD		3 Jenis	255,756,817.54

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	melakukan fasilitasi tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Prov NTB	2200 Org	113,741,197.57	APBD		2200 Org	124,321,000.89
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Prov NTB	36 kali	38,609,542.89	APBD		36 kali	42,200,865.82
4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	melakukan penataan arsip SKPD	jumlah jenis bahan arsip	Prov NTB	3 Jenis	100.160.900	APBD		3 Jenis	124,064,476.10
4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melakukan Suport terhadap pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Prov NTB	16 Org	84,936,461.40	APBD		16 Org	92,836,950.19
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Prov NTB	2 Jenis	1.072.434.828,44	APBD		2 Jenis	2.202.672.491,54
4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia	Prov NTB	1 Unit	700.000.000.00	APBD		3 Unit	1.368.715.842,32
4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Prov NTB	3 Unit	30.000.000.00	APBD		9 Unit	355.230.534.24
4.02.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Melakukan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Sepeda motor listrik)	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Prov NTB	1 Unit	10.000.000.00	APBD		1 Unit	100.000.000.00
4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Melakukan Pengadaan Alat Penyimpanan Kantor dan Meja Kerja	Jumlah Mebel yang tersedia	Prov NTB	3 Unit	188.871.332.44	APBD		8 Unit	224.605.596.82
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan Pengadaan Komputer, Printer,	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	Prov NTB	9 Jenis	63.998.600.00	APBD		9 Jenis	67.784.594.39
4.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Melakukan Pengadaan home use	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	Prov NTB	2 Jenis	79.564.896.00	APBD		2 Jenis	86.335.923.78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prov NTB	3 Jenis	4,270,769,200.00	APBD		3 Jenis	4,537,377,160.66
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melakukan Pengadministrasian Surat menyurat	Jumlah surat keluar	Prov NTB	1000 Surat	9,418,000.00	APBD		1000 Surat	11,298,356.97
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov NTB	4 Jenis	737,863,200.00	APBD		4 Jenis	813,333,419.22
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	menyediakan jasa pelayanan kantor berupa Tenaga Administrasi, Tenaga keamanan dan Tenaga Kebersihan kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum	Prov NTB	116 Org	3,523,488,000.00	APBD		116 Org	3,712,745,384.47
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah	Prov NTB	6 Jenis	2,282,036,525.74	APBD		6 Jenis	2,454,390,544.16
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	Prov NTB	4 Unit	167,600,000.00	APBD		4 Unit	186,204,396.22
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	Jumlah kendaraan operasional	Prov NTB	66 Unit	1,198,060,000.00	APBD		66 Unit	1,231,050,351.64
4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	melakukan pemeliharaan mebel	jumlah jenis mebel	Prov NTB	6 Jenis	25,000,000.00	APBD		6 Jenis	27,775,118.77
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	melakukan pemeliharaan laptop, pc, printer	jumlah jenis peralatan dan mesin	Prov NTB	10 Jenis	350,300,000.00	APBD		10 Jenis	389,184,964.18
4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah aset tetap lain	Prov NTB	1 Jenis	12,500,000.00	APBD		1 Jenis	13,887,559.38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melakukan Pemeliharaan Taman Sekretariat dan Gedung DPRD		Prov NTB	3 Unit	271,281,300.00	APBD		3 Unit	311,611,547.07
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	melakukan pemeliharaan gedung kantor Sekretariat dan Gedung DPRD	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	Prov NTB	3 Unit	257,295,225.74	APBD		3 Unit	294,676,606.90
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	Prov NTB	3 Jenis	40,960,563,331.15	APBD		3 Jenis	42,473,097,431.64
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	Prov NTB	65 Org	39,560,563,331.15	APBD		65 Org	40,929,614,114.40
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Menyediakan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Prov NTB	3 Jenis	1,110,000,000.00	APBD		4 Jenis	1,219,106,417.55
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Melaksanakan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	Prov NTB	65 Org	290,000,000.00	APBD		65 Org	324,376,899.70
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	Prov NTB	3 Jenis	1,103,675,938.52	APBD		3 Jenis	1,190,233,423.64
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Memfasilitasi Kegiatan Fraksi DPRD	jumlah fasilitasi fraksi DPRD	Prov NTB	180 Kali	68,000,278.32	APBD		180 Kali	73,333,304.87
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Prov NTB	46 Kali	553,220,694.05	APBD		48 Kali	596,607,878.94
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Menyediakan kebutuhan rumah tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD	Prov NTB	3 Jenis	482,454,966.14	APBD		3 Jenis	520,292,239.84
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prov NTB	100%	48.613.000.000,00	APBD		100%	53.598.000.000,00
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Prov NTB	9 Dok	3,535,354,860.82	APBD		9 Dok	3.895.967.790,59

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun program pembentukan perda (propemperda)	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	Prov NTB	6 raperda	344,602,300.00	APBD		6 raperda	413,404,098.27
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Membahas Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	Prov NTB	12 raperda	354,746,000.00	APBD		12 raperda	425,573,045.35
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Melaksanakan sosialisasi perda	Jumlah sosialisasi perda	Prov NTB	1 Kali	2,510,968,500.00	APBD		1 Kali	2,719,612,833.67
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Memfasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	Prov NTB	6 Naskah	301,070,000.00	APBD		6 Naskah	311,180,328.36
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Menyusun dokumen tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib	Prov NTB	1 Dok	23,968,060.82	APBD		1 Dok	26,197,484.94
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Prov NTB	Dok	770,044,384.89	APBD		Dok	835,575,695.59
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Memfasilitasi rapat pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	Prov NTB	14 kali	169,995,879.52	APBD		14 kali	184,462,646.66
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	emfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prov NTB	15 kali	184.966.435,70	APBD		15 kali	201,144,503.11
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	Prov NTB	14 kali	169,925,391.89	APBD		14 kali	184,386,160.48
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	Prov NTB	10 kali	122,376,838.89	APBD		10 kali	132,791,192.67
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prov NTB	10 kali	122,376,838.89	APBD		10 kali	132,791,192.67
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Prov NTB	5 Dok	308,681,800.00	APBD		5 Dok	460,054,931.09

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prov NTB	36 kali	50,002,800.00	APBD		36 kali	78,324,639.51
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prov NTB	36 kali	50,002,800.00	APBD		36 kali	78,324,639.51
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prov NTB	36 kali	50,002,800.00	APBD		36 kali	78,324,639.51
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prov NTB	36 kali	50,002,800.00	APBD		36 kali	78,324,639.51
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Prov NTB	36 kali	50,002,800.00	APBD		36 kali	78,324,639.51
4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Memfasilitasi rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prov NTB	1 Dok	58,667,800.00	APBD		1 Dok	68,431,733.54
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Prov NTB	65 Org	4,179,091,400.00	APBD		65 Org	4.944.839.124,56
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Workshop/Bimtek DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	Prov NTB	65 Org	1,809,777,100.00	APBD		65 Org	2,068,121,150.35

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Melakukan publikasi dan dokumentasi Kegiatan DPRD	Jumlah publikasi dan dokumentasi	Prov NTB	36 kali	1,045,081,300.00	APBD		36 kali	1,288,094,365.87
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Menyediakan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	Prov NTB	200 Org	425,580,000.00	APBD		200 Org	510,549,454.09
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Menyediakan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Prov NTB	9 Org	360,995,100.00	APBD		9 Org	433,069,813.51
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi Kegiatan Hearing DPRD	Jumlah orang yang difasilitasi	Prov NTB	480 Org	62,448,000.00	APBD		480 Org	74,916,096.41
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Menyusun Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	Prov NTB	1 Dok	475,209,900.00	APBD		1 Dok	570,088,244.33
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prov NTB	5 Dok	25.917.854.178,88	APBD		5 Dok	29.149.361.722,72
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah SPPD	Prov NTB	975 Kali	8,093,016,127.23	APBD		975 Kali	10.322.283.417,12
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Menyusun Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prov NTB	2 Dok	136,327,836.83	APBD		2 Dok	149,008,569.32
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Melaksanakan Reses	Jumlah reses	Prov NTB	3 Kali	17,688.510.214,82	APBD		3 Kali	18,678,069,736.28
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prov NTB	2 Dok	37,630,875.41	APBD		2 Dok	41,131,166.15
4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen kode etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	Prov NTB	1 Dok	17,003,497.64	APBD		1 Dok	18,585,102.76
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen pengawasan kode etik DPRD	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	Prov NTB	12 Dok	20,627,377.77	APBD		12 Dok	22,546,063.39
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	Prov NTB	4 Jenis	13,864,342,500.00	APBD		4 Jenis	14,271,069,569.29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah SPPD	Prov NTB	975 Kali	12,000,550,000.00	APBD		975 Kali	12,320,557,919.65
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Menyusun laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD	Prov NTB	1 Dok	11,530,500.00	APBD		1 Dok	13,832,629.54
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Memfasilitasi Rapat Badan Musyawarah DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	Prov NTB	12 Dok	122,162,000.00	APBD		12 Dok	136,525,279.06
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Memfasilitasi Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pimpinan serta Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	Prov NTB	4 Org	1,730,100,000.00	APBD		4 Org	1,800,153,741.04
TOTAL						112,134,034,877.00				123,634,047,295.01

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator dan target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Table 8. Program/Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Tahun 2022

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			WTP	112,134,034,877.00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	BB	63.521.437.877,00	Prov NTB
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	22 Dok	328,346,681.21	Prov NTB
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dok	30,810,233.91	Prov NTB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dok	91,298,706.65	Prov NTB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dok	85,320,403.67	Prov NTB
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dok	34,044,845.54	Prov NTB
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dok	30,732,380.21	Prov NTB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	1 Dok	25,484,791.44	Prov NTB
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD	16 Dok	30,655,319.78	Prov NTB
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	12.166.160.626,67	Prov NTB
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	129 Org	11.725.605.328,70	Prov NTB
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa	3 Org	241,053,417.16	Prov NTB

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang di verifikasi	7500 Dok	171,939,970.76	Prov NTB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1 Dok	3,371,167.25	Prov NTB
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	3 Dok	24,190,742.81	Prov NTB
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD	7 Dok	22,466,515.64	Prov NTB
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	5 Dok	1,841,517.68	Prov NTB
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	2 Dok	6,941,105.08	Prov NTB
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis bahan penatausahaan BMD	2 Jenis	13,683,892.88	Prov NTB
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 jenis	328,903,320.39	Prov NTB
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	129 Org	68,170,604.54	Prov NTB
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	129 Item	6,000,000.00	Prov NTB
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaannya	129 Org	33,415,669.78	Prov NTB
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	3 Org	6,000,000.00	Prov NTB
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Org	28,332,174.40	Prov NTB

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	20 Org	186,984,871.66	Prov NTB
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD	9 Jenis	986.080.909,24	Prov NTB
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	4 Jenis	105,833,437.36	Prov NTB
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan Rumah tangga yang disediakan	1 Jenis	95,154,901.33	Prov NTB
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	22 Jenis	159,987,040.24	Prov NTB
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	7 Jenis	73,665,693.28	Prov NTB
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	213,991,735.16	Prov NTB
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	2200 Org	113,741,197.57	Prov NTB
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 kali	38,609,542.89	Prov NTB
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis bahan arsip	3 Jenis	113,741.197,57	Prov NTB
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	16 Org	84.936.461,40	Prov NTB
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	2 Jenis	1.072.434.828,44	Prov NTB
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia	1 Unit	700.000.000,00	Prov NTB

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	3 Unit	30,000,000.00	Prov NTB
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	1 Unit	10,000,000.00	Prov NTB
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	3 Unit	188,871,332.44	Prov NTB
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	9 Jenis	63,998,600.00	Prov NTB
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	2 Jenis	79,564,896.00	Prov NTB
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	4,270,769,200.00	Prov NTB
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	1000 Surat	9,418,000.00	Prov NTB
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	737,863,200.00	Prov NTB
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum	116 Org	3,523,488,000.00	Prov NTB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah	6 Jenis	2,282,036,525.74	Prov NTB
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	4 Unit	167,600,000.00	Prov NTB
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	66 Unit	1,198,060,000.00	Prov NTB
			Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mebel	6 Jenis	25,000,000.00	Prov NTB

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin	10 Jenis	350,300,000.00	Prov NTB
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain	1 Jenis	12,500,000.00	Prov NTB
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit	271,281,300.00	Prov NTB
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit	257,295,225.74	Prov NTB
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	3 Jenis	40,960,563,331.15	Prov NTB
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	65 Org	39,560,563,331.15	Prov NTB
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	3 Jenis	1,110,000,000.00	Prov NTB
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	65 Org	290,000,000.00	Prov NTB
			Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	3 Jenis	1,103,675,938.52	Prov NTB
			Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah fasilitasi fraksi DPRD	180 Kali	68,000,278.32	Prov NTB
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	46 Kali	553,220,694.05	Prov NTB
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD	3 Jenis	482,454,966.14	Prov NTB
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	48.613.000.000,00	Prov NTB
			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dok	3,535,354,860.82	Prov NTB

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	6 raperda	344,602,300.00	Prov NTB
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	12 raperda	354,746,000.00	Prov NTB
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi perda	1 Kali	2,510,968,500.00	Prov NTB
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	6 Naskah	301,070,000.00	Prov NTB
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib	1 Dok	23,968,060.82	Prov NTB
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Dok	770,044,384.89	Prov NTB
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	14 kali	169,995,879.52	Prov NTB
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15 kali	184.966.435,70	Prov NTB
			Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	14 kali	169,925,391.89	Prov NTB
			Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	10 kali	122,376,838.89	Prov NTB
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 kali	122,376,838.89	Prov NTB
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5 Dok	308,681,800.00	Prov NTB
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36 kali	50,002,800.00	Prov NTB

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36 kali	50,002,800.00	Prov NTB
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36 kali	50,002,800.00	Prov NTB
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36 kali	50,002,800.00	Prov NTB
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36 kali	50,002,800.00	Prov NTB
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	58,667,800.00	Prov NTB
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Org	4,179,091,400.00	Prov NTB
			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	65 Org	1,809,777,100.00	Prov NTB
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi	36 kali	1,045,081,300.00	Prov NTB
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	200 Org	425,580,000.00	Prov NTB
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	9 Org	360,995,100.00	Prov NTB
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi	480 Org	62,448,000.00	Prov NTB
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	1 Dok	475,209,900.00	Prov NTB

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 Dok	25.917.854.178,88	Prov NTB
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD	975 Kali	8,093,016,127.23	Prov NTB
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dok	136,327,836.83	Prov NTB
			Pelaksanaan Reses	Jumlah reses	3 Kali	17.688.510.214,82	Prov NTB
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dok	37,630,875.41	Prov NTB
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	1 Dok	17,003,497.64	Prov NTB
			Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	12 Dok	20,627,377.77	Prov NTB
			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis	13,864,342,500.00	Prov NTB
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah SPPD	975 Kali	12,000,550,000.00	Prov NTB
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD	1 Dok	11,530,500.00	Prov NTB
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	12 Dok	122,162,000.00	Prov NTB
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	4 Org	1,730,100,000.00	Prov NTB

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2020

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan.

Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijakan dan implementasi program yang dinilai tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan dan fasilitator terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka membantu menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, memiliki tugas memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyediakan tenaga ahli yang tugasnya membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kedepan peran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan lebih difokuskan pada peran dan fungsi sebagai pelayanan, fasilitator dan mediator yang selalu dituntut untuk mengikuti dinamika DPRD.

Demikian rencana ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang tertuang dalam program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Mataram, Mei 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

MAHDL, SH, MH

NIP. 19650423 199103 1 010